

PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Kantor Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)

Wulan Suci Ika Putri
Email wulansuciikaputri87@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the presentation of Performance Accountability Reporting of Government Agency (LAKIP) and to assess the effectiveness and the efficiency of activity and program in order to evaluate the strategy planning. The object of the research is the government agency of Rungkut District Surabaya. The data collection technique has been done by conducting observation, interview, and documentation. The data analysis technique has been done by using qualitative descriptive. The analysis is done by collecting, processing, and presenting the obtained data so it can provide complete and valid information to solve the existing problems and to make other parties can have the description about the characteristic of the object of the data. A study is needed on the performance indicator assessment i.e. input indicator, output indicator, and outcome, and the characteristic of the outcome. The 2014 Performance Accountability Reporting of Government Agency (LAKIP) and other related data is used to support the research. The manifestation of the performance accountability of Rungkut District Surabaya is generated from the developed performance assessment system which can be used to assess the efficiency and the effectiveness of the implementation of program and activity. Nevertheless, efforts are needed to develop the relevant performance measurements with the implementation of activity and program.

Keywords: *Performance Reporting, Accountability, Efficiency, Effectiveness.*

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan menilai efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan dalam rangka mengevaluasi perencanaan strategi. Objek yang diteliti adalah instansi pemerintah kecamatan Rungkut Surabaya.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tersebut. Kajian diperlukan pada penilaian indikator kinerja yaitu masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta dampak dari *outcome* tersebut. Untuk mendukung penelitian digunakan LAKIP tahun 2014 dan data-data terkait lainnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja kecamatan Rungkut Surabaya, dihasilkan melalui sistem penilaian kinerja yang dikembangkan, yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian tetap diperlukan usaha untuk mengembangkan ukuran-ukuran kinerja yang relevan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kata Kunci: Laporan Kinerja, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik (Bastian, 2010: 87). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan akuntabilitas (tanggung jawab) yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Pegawai negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara memiliki peran sebagai abdi masyarakat.

Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi, dan perubahan operasional yang dibutuhkan, serta proses yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud utama, yaitu 1) Pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, agar lebih terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik, 2) Ukuran kinerja sektor publik, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, 3) Ukuran kinerja sektor publik, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyaul, 2008: 117).

Pengukuran kinerja sektor publik juga diikuti dengan usaha peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas harus merujuk pada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Jadi penerapan akuntabilitas ini, disamping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan (Mahsun, 2009: 87) .

Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara instansi pemerintah adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dilihat adalah kualitas layanan publiknya, sehingga diperlukan pengukuran kinerja pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah dapat mengaplikasikan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian diatas, adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tolok ukur kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, maka penulis mengambil objek penelitian pada Kecamatan Rungkut - Surabaya. Dengan demikian, diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kinerja yang lebih dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan sektor publik. Tujuan penelitian ini adalah : 1) mengevaluasi penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Rungkut-Surabaya. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan atas pemahaman penyusunan LAKIP yang disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. 2) Menilai efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan berdasarkan LAKIP.

TINJAUAN TEORITIS

Organisasi Sektor Publik

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem

administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Penulisan LAKIP Pemerintahan Kecamatan Rungkut Tahun 2014 ini, berpedoman pada rencana kerja Kecamatan Rungkut yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rungkut Tahun 2014 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan daerah.

Menurut Bastian (2010: 30) adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti organisasi pemerintah pusat, daerah, parpol dan LSM, yayasan, pendidikan dan kesehatan serta organisasi tempat ibadah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2010: 25) istilah sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi artinya suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dalam pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2010: 127) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang/jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitasnya tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2009: 115)

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2010: 122) tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom down*);
- Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;
- Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif rasional. Sedangkan menurut Mardiasmo (2010: 122) manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- Memberikan pemahaman mengenai pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah diperbaiki;
- Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Kepuasan Pelanggan

Fokus strategi perusahaan dalam hal ini organisasi sektor publik diarahkan pada pelanggan. Dengan kata lain yang menjadi kebutuhan pelanggan harus dipenuhi oleh sektor publik. Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya *customer focus* dan *customer satisfaction*. Jika pelanggan tidak puas, maka mereka akan mencoba untuk mencari produsen lain yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan pelanggan dibandingkan dengan harapannya (Kotler, 2008: 85).

Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Menurut Fandy (2009: 166), dalam hal ini implementasi pengukuran kepuasan masyarakat terdapat aspek penting yang saling berkaitan. Terdapat lima konsep inti mengenai objek pengukuran, antara lain : 1) Kepuasan pelanggan yaitu pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan. Kedua, menilai dan membandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk dan jasa. 2) Dimensi kepuasan pelanggan terdapat empat langkah ukuran. Pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. Kedua, meminta pelanggan menilai kembali produk atau jasa berdasarkan item-item spesifik, seperti kecepatan layanan, atau keramahan staf layanan pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Keempat, meminta para pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan secara keseluruhan. 3) Konfirmasi harapan kepuasan tidak diukur secara langsung, namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan sejumlah atribut atau dimensi penting. 4) Minat membeli uang diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 5) Ketidakpuasan pelanggan beberapa aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan yaitu : a) Komplain, b) *Retur* atau pengembalian produk, c) Biaya garansi, d) Penarikan kembali produk dari pasar, e) Konsumen beralih kepesaing.

Evaluasi Kinerja

Menurut Mahsun (2009: 159) evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan *reward-punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, yang antara lain :

1) *Feedback* yang diperoleh yaitu hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil inipun biasa dijadikan landasan pemberian *reward an punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi. 2) Penilaian kemajuan organisasi Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil actual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala, maka kemajuan organisasi biasa dinilai. Semestinya, ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode. Jika pada satu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah dari pada periode sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya. 3) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan manajemen maupun stakeholder.

Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan sangat strategis membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga dapat membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi, antara lain : 1) Akuntabilitas Kinerja Menurut Mahsun (2009: 83) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang mejadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 2) Akuntansi untuk ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Menurut Mahmudi (2010: 59) akuntansi sektor publik dapat berperan untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi terkait dengan penggunaan input primer berupa anggaran atau kas menjadi input reguler berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Konsep ekonomi menghendaki organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional organisasi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar. Dimana merupakan perbandingan antara input dengan nilai (anggaran).

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (*target*) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome*, sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*.

Value For Money menghendaki organisasi sektor publik dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektifitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu menggunakan uang publik (anggaran) secara hemat, cermat dan tepat guna untuk mencapai target, sasaran dan tujuan. Efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomi dan efisien, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Jika suatu program efisien dan efektif, maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektifitas dan merupakan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mahsun (2009: 83) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang mejadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Perencanaan Strategik

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan republik Indonesia. Dokumen rencana strategik setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan), antara lain : 1) Visi berkiatan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan harus diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,

antisifatif, inopatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan visi hendaknya mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi. Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu menarik komitmen dan mengerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengerahkan dan menggerakkan segala daya instansi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari peraturan perundang – undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*), dan memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Dalam merumuskan misi, diharapkan mampu melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, mempertimbangkan berbagai masukan dari stake.

Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Strategik (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program (kebijakan dan program). Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sistem yang membahas tentang kinerja instansi pemerintah adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

Aturan baru yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja antara lain UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, PP No. 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, beberapa peraturan tersebut mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca yang didasarkan pada pengukuran kinerja berbasis rencana strategik. Adapun peraturan yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja yaitu PP No. 8 tahun 2006 yaitu tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan singkatan dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah juga merupakan bentuk implementasi dari SAKIP. Dalam pelaporannya LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

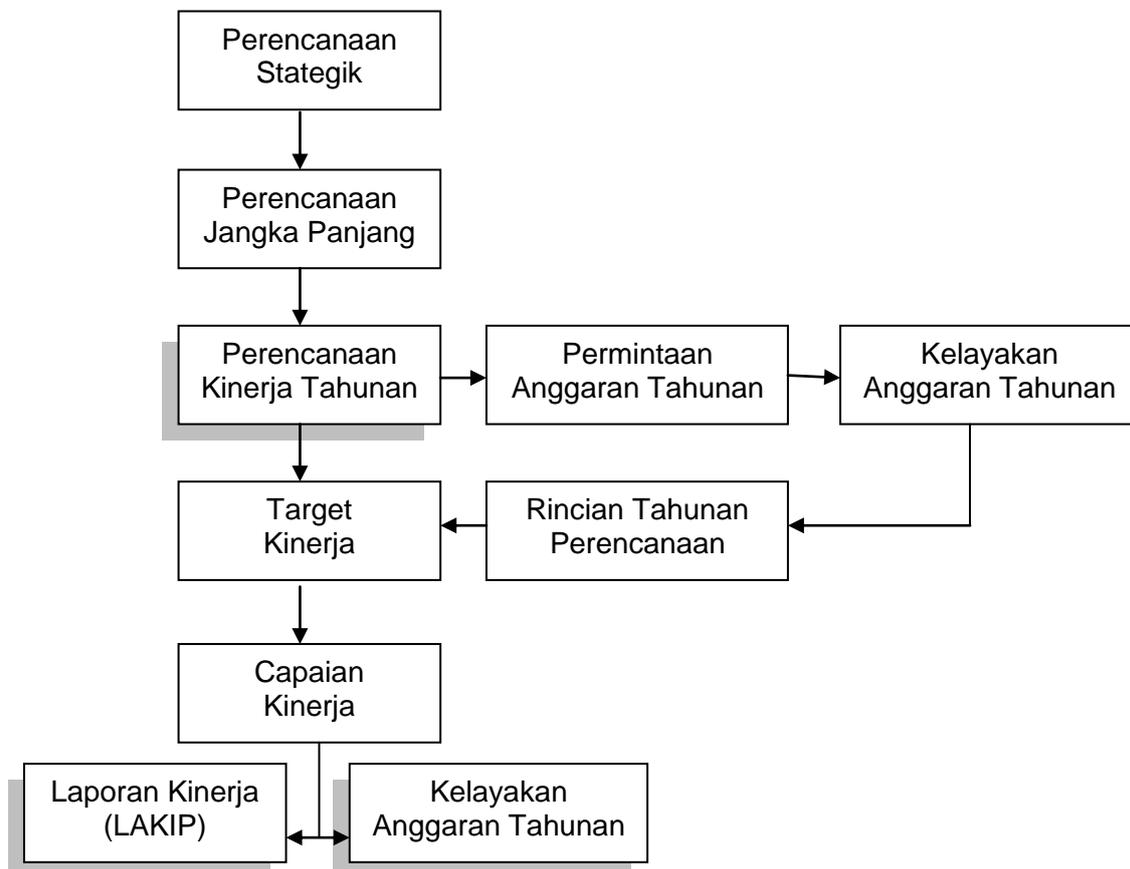
Penetapan Kinerja Tahun 2014

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

Rerangka Pemikiran

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka pemikiran yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategis secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber : Data LAKIP Kecamatan Rungkut

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung diperoleh dari instansi yang menjadi objek penelitian.

Satuan Kajian

Satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah penilaian efisiensi dan efektivitas pelaporan kinerja dengan menyajikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. sehingga satuan kajian pada penelitian ini adalah 1) Beberapa aspek program dan kegiatan mengenai : tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipengang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan, strategik pelaksanaan. 2) Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 3) Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana setiap observasi yang terdapat pada sampel atau populasi tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif secara bersama-sama (*mutual exclusive*) dan kemungkinan tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Metode kualitatif pada penelitian ini dapat disimpulkan merupakan metode dengan pengumpulan data yang berwujud informasi tentang keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang diperoleh dalam suatu pengamatan atau penelitian, yaitu mengenai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) telah menunjukkan laporan kinerja yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik pada kecamatan Rungkut- Surabaya. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut diolah menjadi kalimat yang dapat menjelaskan suatu permasalahan, kemudian diperoleh hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan teori yang ada, dimana teori tersebut menunjang pelaksanaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Visi Kecamatan Rungkut adalah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah "Menuju Masyarakat Rungkut yang Mandiri". Sedangkan Misi Kecamatan Rungkut Surabaya adalah "Mewujudkan kampung *home industry* dengan mengoptimalkan potensi wilayah melalui peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan". Sasaran yang merupakan perwujudan dan merupakan realisasi dari visi dan misi walikota Surabaya yang dilaksanakan Kecamatan Rungkut dalam bentuk kegiatan sangat berbeda dengan perencanaan strategi yang telah disusun oleh Kecamatan Rungkut. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rungkut didukung oleh program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Oleh sebab itu pencapaian sasaran dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan dari jabaran visi dan misi Kecamatan sehingga dari sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ; 1) Tersedianya dokumen pendataan kemiskinan di kecamatan, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang telah dilaksanakan sebanyak 12 laporan dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 100%. Pada kegiatan ini input dana tercapai 86,51% karena adanya pajak, sedangkan indikator output tercapai 100% sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan banyaknya koordinasi dengan BKM. 2) Dalam hal administrasi pemerintahan, Kecamatan Rungkut berupaya meningkatkan operasional pengelolaan administrasi pemerintahan dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan. Input dana yang tercapai yaitu sebesar 98,45%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kegiatan ini adalah tercapainya jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan oprimalisasi kecamatan 100% dengan target sasaran sebesar 300 orang. 3) Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaiin sasaran ini adalah waktu pelaksanaan pemeliharaan jenis sarana dan prasarana. Dari target kinerja tersebut tercapai 100%, input dana yang tercapai 91,64%. Sumber data yang digunakan untuk mengukur output adalah terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara dan yang tersedia untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa. Outcome tercapai 100% untuk mengukur pencapaian indikator outcome, sumber data yang digunakan adalah jumlah sarana dan prasarana perakantoran yang terpelihara dan yang tersedia. 4) Pendataan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) pengukuran kinerja kegiatan pendataan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan data PMKS di kecamatan Rungkut tersusun dengan target 6 laporan. Dari target kinerja tersebut tercapai 6 laporan atau 100%. Keberhasilan ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap problema PMKS. 5) Kegiatan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Rungkut selalu diadakan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, pengukuran kinerja kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah kegiatan operasi yustisi yang terlaksana sebesar 100% dengan target sasaran sebesar 100% dari target kinerja tersebut telah tercapai 94,47%. Keberhasilan tersebut telah tercapai dikarenakan adanya keasadaran masyarakat terhadap ketertiban, kepatuhan akan peraturan daerah. 6) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pengukuran kinerja kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak adalah 2 lembaga dari target kinerja tersebut tercapai 83,22%. Sedangkan input berupa dana tercapai 85,79% sumber data yang digunakan adalah untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh tim penggerak PKK, outcome tercapai 100%. 7) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pengukuran kinerja kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah penerbitan surat keterangan, KTP/KSK serta IMB (rekomendasi) dengan target pengurusan/penyelesaian ijin kurang dari 7 hari dan target terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan adalah 100% dari target kinerja tersebut sudah tercapai sebesar 87,54% keberhasilan ini disebabkan karena semakin meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat. 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengukuran kinerja kegiatan

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah kader lingkungan yang dibina sebanyak 360 orang. Dari target kinerja tersebut tercapai semua atau 100%, input berupa dana tercapai 87,49% karena adanya pajak dan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan ini. Outcome tercapai 100% karena meningkatnya kesadaran masyarakat yang paham dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. 9) Penyediaan barang dan jasa perkantoran, pengukuran kinerja kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah tersedianya 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran dengan target 12 bulan. Dari target kinerja tersebut tercapai 12 bulan atau 100%, input berupa dana tercapai 69,19%. Sumber data yang digunakan untuk mengukur output adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi perkantoran. Output tercapai 100% untuk mengukur pencapaian indikator outcome sumber daya yang digunakan adalah berdasarkan terpenuhinya barang dan jasa pada kantor kecamatan Rungkut. 10) Penyelenggaraan musrenbang perumusan tingkat kecamatan, pengukuran kinerja kegiatan penyelenggaraan musrenbang perumusan tingkat kecamatan. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah usulan prioritas kegiatan pembangunan target 7 kegiatan dari target kinerja tersebut telah tercapai 98,95%. Outcome tercapai 100% karena sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator outcome adalah berdasarkan presentase usulan musrenbang yang disetujui.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Kalirungkut, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Kalirungkut. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan dari kelurahan Kalirungkut tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 87,38%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Kedung Baruk, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Kedung Baruk. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan dari kelurahan Kedung Baruk tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 83,31%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Medokan Ayu, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Medokan Ayu. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan dari kelurahan Medokan Ayu tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 87,56%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Penjaringansari, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Penjaringansari. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini

adalah jumlah laporan dari kelurahan Penjaringan Sari tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 84,57%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Rungkut Kidul, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Rungkut Kidul. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan dari kelurahan Rungkut Kidul tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 84,87%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Terlaksananya operasional kegiatan kelurahan Wonorejo, pengukuran kinerja pelaksanaan operasional kegiatan kelurahan Wonorejo. Dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah laporan dari kelurahan Wonorejo tersusun dengan target 12 bulan dari target kinerja tersebut tercapai 12 laporan atau 100%. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 82,42%. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk memahami pentingnya administrasi kelurahan.

Dari data LAKIP di kecamatan Rungkut, monitoring dan pendataan kemiskinan dana yang terserap 86,51% dengan output jumlah kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang dilaksanakan berhasil 100% dan keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar berhasil 100%.

Untuk memperkuat hasil dari penelitian saya di Kecamatan Rungkut Surabaya, berikut hasil wawancara langsung saya dengan Camat Rungkut Kota Surabaya Drs. Ridwan Mubarun M.Si pada tanggal 13 Oktober 2015. "Pelayanan dasar untuk warga miskin dilakukan pendataan, monitoring dan diberi pelatihan dasar, supaya memiliki keahlian. Dan berdasarkan data LAKIP pada tahun 2014 warga yang dilatih berhasil seratus persen, sehingga mereka dapat menambah income pendapatan mereka. Bentuk pemeliharaan sarana dan pra sarana di Kecamatan Rungkut misalnya service AC, komputer, printer, pengecatan ulang bangunan kantor dan lain-lain. Kegiatan untuk menangani penyandang masalah sosial melakukan pendataan, melakukan penanganan gender anak, melakukan sosialisasi Perda kepada ibu-ibu PKK, pembinaan penyuluhan berupa kepada PMKS. Kegiatan di Satpol PP seperti Yustisi kependudukan, pengawasan masalah Mangrove, yustisi IMB dan sebagainya. Langkah konkrit masalah gender anak dengan membentuk pos curhat, melatih kader-kader untuk ibu-ibu bisa konseling bagi yang terkena KDRT dan anak-anak yang terkena masalah sosial tersebut. Pelayanan publik diadakan pelayanan malam hari dan hari libur dan mendatangi Balai RW langsung melayani warga di wilayah tersebut. Penanganan sampah dilakukan dari skala yang kecil yakni rumah tangga, pemilahan sampah basah dan kering. Untuk musrembang, data hari hasil usulan dari RW secara *online*. Data usulan dari RW untuk diteruskan di kelurahan setelah disepakati lalu diteruskan di tingkat kecamatan lalu tingkat kota dalam 1 tahun sekali, sesuai dengan target yang diharapkan.

Pencapaian Sasaran Anggaran dan Realisasi Belanja

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1
 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
 Kecamatan Rungkut Tahun 2014

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	Prosentase
1	Program penanggulangan kemiskinan	Monitoring dan Pendapatan Kemiskinan	Rp 111.687.050	Rp 96.619.260	Rp (15.067.790)	86,51%
2	Program penataan daerah otonom	Pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi Kecamatan	Rp 14.094.850	Rp 13.876.350	Rp (218.500)	98,45%
3	Program peningkatan sarana dan prasarana	pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp 66.132.368	Rp 60.603.100	Rp (5.529.268)	91,64%
4	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS)	Rp 44.752.200	Rp 42.743.500	Rp (2.008.700)	95,51%
5	Program pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Rp 364.527.000	Rp 344.361.495	Rp (20.165.505)	94,47%
6	Program penguatan kelembagaan penganustamaan gender dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp 113.448.320	Rp 94.409.560	Rp (19.038.760)	83,22%
7	Program pendataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 386.696.880	Rp 338.510.655	Rp (48.186.225)	87,54%
8	Program pengelolaan kebersihan kota	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp 119.194.500	Rp 104.279.680	Rp (14.914.820)	87,49%
9	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Rp 841.815.612	Rp 582.481.152	Rp (259.334.460)	69,19%
10	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang perumusan tingkat kecamatan	Rp 6.073.060	Rp 6.009.500	Rp (63.560)	98,95%
11	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Kalirungkut	Rp 728.294.997	Rp 636.416.988	Rp (91.878.009)	87,38%
12	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Kedung Baruk	Rp 578.391.288	Rp 487.646.191	Rp (90.745.097)	84,31%
13	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Medokan Ayu	Rp 716.687.163	Rp 627.504.480	Rp (89.182.683)	87,56%
14	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Penjaringansari	Rp 610.010.975	Rp 515.899.125	Rp (94.111.850)	84,57%
15	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Rungkut Kidul	Rp 609.329.536	Rp 517.119.348	Rp (92.210.188)	84,87%
16	Program penataan kelembagaan dam ketatalaksanaan	Operasional kegiatan kelurahan Monorejo	Rp 584.948.386	Rp 482.125.907	Rp (102.822.479)	82,42%

Sumber: Data LAKIP Kecamatan Rungkut, diolah.

Berdasarkan laporan kinerja dan data serapan anggaran pada Kecamatan Rungkut dapat dijelaskan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rungkut pada tahun 2014 kesemuanya menunjukkan keberhasilan. Program - program yang dilaksanakan dapat tercapai, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan lagi untuk Menuju Masyarakat Rungkut yang Mandiri.

Pelayanan dasar untuk keluarga miskin dan penanganan yang dilakukan di kecamatan Rungkut yakni dilakukan pendataan dimonitoring dan diberi pelatihan dasar, supaya memiliki keahlian. Berdasarkan data LAKIP pada tahun 2014 berhasil 100% untuk dilatih berhasil seratus persen, untuk tambahan income pendapatan mereka. Bentuk pemeliharaan sarana dan prasana perkantoran di kecamatan Rungkut adalah sarana dan prasarana dilakukan secara rutin yang ada di kecamatan Rungkut. Misalnya AC, komputer, printer, pengecatan bangunan dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan untuk penyandang masalah sosial adalah kegiatan pendataan, melakukan penanganan gender anak, melakukan sosialisasi Perda kepada ibu-ibu PKK, pembinaan penyuluhan berupa kepada PMKS. Pelatihan lainnya yang bertujuan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat penyandang masalah sosial. Masalah di satpol PP serta bentuk kegiatan dengan penggunaan dana di Satpol PP dilakukan pembinaan Satpol PP seperti Yustisi kependudukan, pengawasan masalah Mangrove, yustisi IMB dan sebagainya. Dalam penanganan masalah gender dan anak langkah konkrit yang sudah dilakukan di kecamatan Rungkut adalah dengan membentuk pos curhat, melatih kader-kader untuk ibu-ibu yang terkena KDRT dan anak-anak yang terkena masalah sosial tersebut. Penggunaan dana untuk pelayanan publik, cara peningkatan pelayanan publik di kecamatan Rungkut dengan pelayanan publik diadakan pelayanan malam hari dan hari libur dan mendatangi Balai RW langsung melayani warga di wilayah tersebut. Pengelolaan penanganan sampah dilakukan dari skala yang kecil yakni rumah tangga, pemilahan sampah basah dan kering. Sisa makanan, sampah kering untuk kerajinan sampah. Penanganan sampah dilakukan oleh kader lingkungan di wilayahnya tersebut. Penggunaan data untuk Musrenbang, data hari hasil usulan dari RW secara online. Data usulan dari RW untuk diteruskan di kelurahan setelah disepakati lalu diteruskan di tingkat kecamatan lalu tingkat kota dalam 1 tahun sekali, sesuai dengan target yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 1) Seorang Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2) Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) kecamatan Rungkut pada tahun anggaran 2014 mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam melaksanakan program yang telah dicabangkan oleh kecamatan Rungkut pada tahun anggaran 2014. 3) Pencapaian sasaran yang dilaksanakan oleh kecamatan Rungkut telah menyerap dana sebesar Rp. 4.950.606.292.

Saran

Dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah wacana kita dan pengetahuan terhadap pemerintahan di tingkat kecamatan, khususnya kecamatan Rungkut, sebagai saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak kecamatan Rungkut sebagai berikut: 1) Hendaknya kecamatan Rungkut lebih disiapkan dalam aspek kualitas sumber daya manusia (SDM), aparatur yang mampu mendukung pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah kota ke kecamatan. 2) Dalam penyusunan LAKIP sebaiknya kecamatan

Rungkut Surabaya dapat menyajikan perolehan hasil (*outcome*) dari kinerja selama tahun berjalan, agar pembaca dapat mengerti dan membandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. 3) Dalam menghadapi kendala pengumpulan data LAKIP, sebaiknya kecamatan Rungkut Surabaya menyusun *deadline* pengumpulan data, sehingga pengumpulan data dari masing - masing fungsi dan pelaporan LAKIP tepat waktu. 4) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka kecamatan Rungkut Surabaya hendaknya selalu mengembangkan inovasi - inovasi baru agar kegiatan berjalan semakin baik lagi dan lebih efisien. 5) Untuk memperbaiki indikator kinerja yang digunakan pada kecamatan Rungkut Surabaya hendaknya digunakan ukuran - ukuran kinerja yang relevan dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar untuk menilai efisiensi dan efektivitas, dan tidak semata-mata menggunakan ukuran keuangan saja (anggaran dan realisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, R. 2004. Efektifitas Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Mengukur Kinerja Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi. Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Ain, M. Q. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Uppd Provinsi Wilayah Xii Subang). *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*. Universitas Parahyangan Bandung.
- Anggadini, S. D. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi* . Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian*. Edisi revisi IV. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi I. Erlangga. Jakarta
- Fandy. T. dan D. Anastasia. 2009. *Total Quality Management*. Andi. Yogyakarta.
- Ihyaul, U. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. UMM. Malang.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPPSTIM YKPN. Jakarta.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Jakarta.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sukowati, K. 2010. Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wardhani, A.P. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. *Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana*, Salatiga.
- Kotler, dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran* Jilid 2. Edisi Ketiga Belas. Erlangga. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, 2004. Undang-Undang No. 33 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah No. 56 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 *Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____, 2006. Peraturan Pemerintah No. 8 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____, 2004. Instruksi Presiden No. 5 *Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 *Tentang Penetapan Kinerja*.
- DEPUTI IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. Jakarta.

